Strategi Funding Financing Profesionalisme Pekerja Migran Indonesia Sebagai Solusi Defisit Neraca Transaksi Berjalan

*Financing Funding Strategy Professionalism of
Indonesian Migrant Workers As the Current Account
Deficit Solution*

Reny Fitriana Kaban¹⁾

Selamet Riyadi²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Pebanas ^{1, 2)}

email: reny.fitriana@perbanas.id

selamet.riyadi@perbanas.id

Submit: 7 September 2020; *Direvisi:* 27 September 2020; *Publish:* 29 Oktober 2020

Abstract

This research aims to describe the phenomenon of the current account deficit problem in Indonesia especially service balance for the last ten years due to a low number of migrant workers in the formal sector, despite the increase of remittance numbers. The research method is descriptive exploratory, which describes and analyses accurate data such as BI annual reports, data from BP2MI (previously BNP2TKI), and data from related institutions also some supportive kinds of literature. The Result shows the professionalism of Indonesian Migrant Workers has proven in making a significant contribution to increase the remittance and solve the deficit of the current account. Authors recommend the Synergy and Coordination of Funding Financing (SCFF) strategy concept which involves various concerning sectors as a solution for the current account deficit.

Keywords: Deficit; Current Account; Remittance; Migrant Worker

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan fenomena masalah defisit transaksi neraca berjalan di Indonesia khususnya neraca jasa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir dikarenakan rendahnya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor formal, meskipun nilai remitansi mengalami peningkatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif, yakni mendeskripsikan dan menganalisa data-data akurat seperti laporan tahunan BI, data BP2MI (sebelumnya BNP2TKI) dan data lembaga terkait serta literatur penunjang. Hasil penelitian menunjukkan profesionalisme PMI terbukti telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan remitansi dan mengatasi defisit neraca transaksi berjalan. Penulis merekomendasikan konsep strategi Sinergi dan Koordinasi *Funding Financing* (SKFF) yang melibatkan berbagai sektor yang berkepentingan sebagai suatu solusi mengatasi defisit neraca transaksi berjalan.

Kata kunci: Defisit; Neraca Transaksi Berjalan; Remitansi; Pekerja Migran Indonesia

1. PENDAHULUAN

Ekonomi negara di dunia di era globalisasi saat ini tak bisa terlepas dari transaksi perdagangan internasional dan hubungan ekonomi antar negara menjadi faktor penting yang berdampak pada perkembangan ekonominya (Astuti, Oktavilia, & Rahman, 2015). Perdagangan internasional, perdagangan antar atau lintas negara yang mencakup ekspor dan impor, dibagi menjadi dua kategori yakni perdagangan barang (fisik) dan perdagangan jasa (Tambunan, 2011). Semua transaksi perdagangan internasional negara-negara di dunia dicatat dalam transaksi neraca berjalan yang merupakan bagian dari neraca pembayaran internasional atau *Balance of Payments* (Leonufna, Kumaat, Mandeij, & Ratulangi, 2016) yang merefleksikan perubahan dan transfer modal terkait dengan situasi di luar negeri (Sandu, 2015).

Situasi atau keadaan perekonomian di suatu negara dapat digambarkan dari transaksi neraca berjalannya (*current account*), sehingga data yang terdapat di dalamnya memiliki nilai urgensi yang tinggi, disamping defisitnya neraca transaksi berjalan dapat mengakibatkan krisis negara yang bersangkutan (Lapian, Rotinsulu, & Wauran, 2018). Neraca transaksi berjalan terdiri dari empat komponen, yaitu neraca perdagangan barang, neraca perdagangan jasa, neraca pendapatan, dan neraca transfer. Defisit atau surplus neraca transaksi berjalan sangat ditentukan oleh kondisi defisit atau surplus dalam empat neraca tersebut (Fahmi, 2020). Saat ini Indonesia mengalami defisit baik pada neraca perdagangan maupun neraca jasa.

Bank Indonesia (BI) menanggulangi defisit dengan cara menjalankan kebijakan moneter yakni melakukan penyesuaian pada tingkat suku bunga. Namun, kebijakan ini bersifat jangka pendek. Sementara dalam jangka panjang, pemerintah menjalankan kebijakan struktural diantaranya dengan menggenjot laju ekspor dan menekan laju impor karena keduanya menjadi faktor utama terjadinya defisit (Keuangan, 2018). Untuk neraca jasa di Indonesia masih terjadi defisit yang cukup besar antara ekspor dan impor. Hingga tahun 2019 defisit mencapai 7.784 juta USD. Walaupun trennya sejak 2013 mengalami penurunan nilai. Penurunan ini dikarenakan peningkatan ekspor jasa yang terus digenjot oleh pemerintah. Namun pada saat yang sama terjadi peningkatan impor jasa ke Indonesia. Walaupun sempat turun di tahun 2015, namun terus mengalami kenaikan kembali hingga tahun 2019. Pada Gambar 1 terlihat tren positif ekspor jasa, peningkatan impor dan defisit neraca jasa dalam sepuluh tahun terakhir ini.

Gambar 1. Data Export Impor Jasa

Sumber : Data NPI- Bank Indonesia, diolah

Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah defisit jasa adalah dengan meningkatkan pendapatan

atau *Funding* dari sektor ekspor Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurut Palmer, selain untuk mengatasi masalah pengangguran, strategi pemerintah dalam pengiriman TKI ke luar negeri bertujuan untuk mendapatkan sumber devisa luar negeri (Raharto, 2017). Peningkatan nilai *personal transfer* dalam bentuk remitansi atau pendapatan yang diperoleh dari PMI sebagai bukti akan hal ini, sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Hingga tahun 2019 nilai *personal transfer* telah mencapai 7.277 juta Dollar, setelah mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun sebelumnya yakni sebesar 4.095 juta USD di tahun 2016 dan 4.089 juta USD di tahun 2017.

Gambar 2. Personal Transfer
Sumber : Data NPI- Bank Indonesia, diolah

Namun sayangnya nilai transfer personal (remitansi) yang meningkat dalam tiga tahun terakhir tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan dari jumlah PMI. Menurut data yang diperoleh dari Bank Indonesia, jumlah PMI pada tahun 2019 sebesar 3,742 juta orang. Jumlah ini sedikit peningkatan (sekitar 3.7%) dari tahun sebelumnya yakni 3,65 juta orang. Dalam 10 tahun terakhir ini jumlah PMI terus menurun sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.

Gambar 3. Data Pekerja Migran Indonesia
Sumber : Data NPI- Bank Indonesia, diolah

Penurunan jumlah PMI ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah berupa moratorium Tenaga Kerja Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moratorium bermakna penundaan atau penangguhan. Adapula yang mengartikan moratorium sebagai penghentian yang bersifat sementara. Oleh karena itu, moratorium TKI bermakna sebagai penghentian sementara pengiriman TKI ke negara tertentu. Sejak Agustus 2011, Pemerintah Indonesia sudah melakukan moratorium pengiriman TKI informal ke Arab Saudi. TKI informal adalah

TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan. Bahkan pada tahun 2015, moratorium TKI informal tidak hanya terhadap Arab Saudi akan tetapi juga 18 negara lainnya di Timur Tengah melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah. Moratorium dilakukan karena banyaknya jumlah kasus kekerasan yang dialami TKI informal dan lemahnya jaminan perlindungan yang diberikan oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah terhadap TKI informal.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pranowo (2019) mengenai kondisi neraca pembayaran di Indonesia dan masalah defisit transaksi neraca berjalan, hasilnya menunjukkan terdapat pengaruh positif variabel Net Ekspor dan Pendapatan Primer terhadap variabel Rasio Neraca Transaksi Berjalan. Net Ekspor adalah peningkatan ekspor dan pengurangan impor, terkait tulisan ini maka perlu dilakukan peningkatan ekspor, salah satunya dari sektor jasa untuk menangani masalah defisit transaksi neraca berjalan. Sejalan dengan itu penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2014) menyimpulkan perlu penyesuaian untuk memperbaiki kondisi neraca transaksi berjalan menuju keseimbangan. Sementara penelitian lain yang dilakukan oleh Prihanto (2013) menunjukkan pada periode penelitian adanya penurunan jumlah PMI sebesar 0,2% padahal terjadi peningkatan pertumbuhan remitansi PMI sebesar 0,6% dan hasil penelitiannya menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara besarnya pekerja migran sektor formal, besarnya pekerja migran sektor informal, dan negara penempatan pekerja terhadap remitan yang dikirimkan. Hasil penelitian ini khususnya tentang implikasi jumlah PMI sektor formal terhadap peningkatan jumlah remitansi sejalan dengan temuan penulis sebagai bahan awal penelitian.

Kontradiksi antara kebutuhan ekspor jasa PMI sebagai salah satu solusi menangani defisit transaksi neraca berjalan dan fakta penurunan jumlah PMI dikarenakan adanya moratorium TKI informal padahal di sisi lain terjadi peningkatan remitansi, merupakan suatu masalah yang perlu dicari solusinya. Sedangkan pada penelitian terdahulu belum ada pembahasan mengenai kedua hal berikut ini. Pertama belum ada yang menganalisa tentang urgensi dari peningkatan profesionalisme PMI, agar digeser dari tenaga kerja informal menjadi formal, sebagai jalan keluar dari permasalahan ini. Kedua, belum ada analisa atas upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai lintas sektor baik pemerintah maupun swasta, baik dari sisi pendanaan (*funding*) maupun pembiayaan (*financing*) terhadap peningkatan profesionalisme. Dalam tulisan ini penulis membahas kedua hal tersebut dan merekomendasikan konsep kepada *stakeholder* sebagai salah satu bahan rujukan dalam mengambil kebijakan yang efektif terkait profesionalisme PMI. Konsep strategi sinergi dan koordinasi *funding-financing* profesionalisme PMI ditawarkan sebagai solusi defisit neraca transaksi berjalan berdasarkan analisa fakta dan data pendukung yang diperoleh dari referensi terkait.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif yang berupaya mencari solusi atas sebuah permasalahan yang ada. Rancangan kegiatan penelitian berawal dari mengangkat sebuah

fenomena penting yang menjadi permasalahan bangsa yakni masalah defisit transaksi neraca berjalan yang ada di Indonesia akhir-akhir ini. Berangkat dari permasalahan tersebut kemudian dicari data-data sekunder yang relevan dengan fenomena yang ada, dalam hal ini penulis memfokuskan pada salah satu bagian dari neraca transaksi berjalan yakni neraca jasa. Selain data defisit neraca jasa terdapat pula data peningkatan jumlah remitansi dan data penurunan jumlah PMI selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, yang mana data-data tersebut adalah rangkaian dari masalah penelitian yang ada. Tahapan terakhir dari penelitian ini adalah merekomendasikan konsep strategi atas permasalahan yang ada dengan dukungan data-data yang menunjang konsep tersebut.

Data penelitian khususnya defisit transaksi neraca berjalan dalam hal ini defisit neraca jasa diolah dari selisih jumlah ekspor dan impor jasa di Indonesia selama kurun waktu 2010-2019. Data diperoleh dari Laporan Neraca Pembayaran Indonesia yang dikeluarkan oleh BI. Dari laporan tersebut juga diperoleh data tentang jumlah remitansi PMI dan jumlah PMI di Indonesia tahun 2010-2019. Sementara data penunjang untuk di pembahasan yaitu data mengenai jumlah penempatan PMI di sektor formal dan informal, remitansi PMI berdasarkan negara tujuan, jumlah penempatan PMI berdasarkan provinsi, penempatan PMI program GTG ke Korea Selatan dan Jepang serta jumlah *Nurse* dan *Careworker* yang lulus ujian Nasional di Jepang yang diambil dari Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) maupun data dari Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di tahun 2019. Teknik pengumpulan data menggunakan eksploratif sumber-sumber data sekunder dan dokumen lainnya yang diolah mandiri dan disajikan dengan gambar maupun tabel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dari BP2MI (sebelumnya disebut BNP2TKI), penempatan PMI untuk sektor formal di bulan Mei 2020 adalah 812 orang, jumlah ini jauh menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya dikarenakan kondisi pandemi Covid 19 yang melanda dunia. Pada Mei 2019 dimana belum terjadi pandemi jumlah PMI di sektor formal cukup besar yakni 15.020 orang. Sementara untuk sektor informal terjadi penurunan yang cukup drastis juga dari tahun sebelumnya sebanyak 14.159 pada Mei 2019 orang menjadi hanya 2.399 pada Mei 2020 yang disebabkan oleh kebijakan penghentian PMI di masa pandemi selain dipicu oleh kebijakan moratorium pemerintah. Artinya pemerintah telah berusaha mengurangi jumlah PMI sektor informal dan meningkatkan penempatan PMI di sektor formal.

Gambar 4. Penempatan PMI di Sektor Formal dan Informal
Sumber : Data BP2MI, Mei 2020

Sedangkan penempatan PMI berdasarkan jabatan lima besarnya ada pada posisi *domestic worker* atau Asisten Rumah Tangga (ART), *caregiver* (pengasuh), *operator*, *worker* (buruh) dan *plantation worker* (tukang kebun). Sayangnya untuk pekerjaan yang jabatan profesional seperti teknisi, *nurse*, terapis dsb belum merupakan jabatan yang banyak ditempatkan, padahal jumlah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia cukup tinggi. Sementara penempatan PMI dalam kurun tiga tahun terakhir berdasarkan Kelompok Lapangan Usaha Indonesia terbesar ada pada sektor usaha jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan, dilanjutkan oleh industri pengolahan dan yang ketiga pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor usaha informal masih lebih mendominasi dibandingkan yang formal. Namun tidak berarti pekerjaan yang ada pada sektor informal tidak memerlukan profesionalisme.

Profesionalisme suatu pekerjaan dapat dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan SMK di Indonesia bertujuan untuk menciptakan lulusan yang siap kerja. Namun berdasarkan data BPS (Jayani, 2020) tingkat pengangguran dari lulusan SMK paling tinggi dibanding dengan lulusan dari jenjang pendidikan lainnya. Angka pengangguran dari lulusan SMK pada Februari 2019 mencapai 8,63% (lihat Gambar 5).

Gambar 5. Lulusan SMK Mendominasi Tingkat Pengangguran Terbuka
Sumber : Katadata.co.id

Tingginya angka pengangguran dari siswa lulusan SMK disebabkan oleh tidak seimbangnya daya serap industri dengan jumlah angkatan kerja dari SMK. Selain itu, banyak guru yang tidak menguasai bidang ajaran, terutama untuk mengajar ketrampilan bagi siswa. Sebab guru-guru SMK saat ini masih banyak dari guru yang hanya menguasai ilmu murni. Untuk itu diperlukan upaya terobosan guna mencetak calon guru sesuai bidang, seperti pertanian, kelautan, ekonomi kreatif maupun teknologi informasi melalui pendidikan dan pelatihan agar tercipta guru-guru yang profesional (Sahari, 2015). Kondisi tingginya angka pengangguran dari lulusan SMK ini menjadi kontradiktif apabila ditelaah besarnya *demand* atau permintaan tenaga kerja siap pakai yang berkualitas untuk dikirim ke luar negeri. Oleh sebab itu perlu dirumuskan strategi peningkatan kualitas PMI yang salah satunya bisa merupakan lulusan SMK melalui penguasaan keterampilan dan teknologi untuk menghasilkan komoditas ekspor yang bernilai tambah tinggi.

Selain latar belakang pendidikan dan keterampilan PMI yang rendah yang berdampak secara tidak langsung terhadap defisit neraca

jasa masalah lain berasal dari sisi *funding* atau pengumpulan remitansi PMI. Ada masalah mendasar yakni biaya pengiriman remitansi PMI yang tinggi dibandingkan dengan jumlah yang dikirim ke tanah air serta kurangnya informasi produk perbankan yang dapat mereka gunakan. Saat ini PMI umumnya mengirim secara tunai remitansinya, karena pengiriman lewat perbankan maupun secara *online* masih membebaskan biaya transfer yang cukup mahal. Sementara penghasilan yang tidak tinggi akibat bekerja di sektor informal menyebabkan PMI terbebani oleh biaya transfer tersebut. Hal itu menjadi salah satu penyebab alur remitansi di Indonesia tidak tercatat dengan jelas nilainya, karena adanya transaksi *shadow banking* yang dilakukan untuk meminimalisir biaya transfer. Contohnya menitipkan uang tunai kepada kawan yang pulang kampung lalu ditransfer antar rekening, menggunakan jasa transfer sesama orang Indonesia dengan kurs tengah yang disepakati sehingga PMI tersebut tinggal mentransfer dalam nominal negara asal ke rekening bank lokal dan dana tersebut ditransfer antar rekening di Indonesia ke rekening penerima. Pengiriman dengan cara menitipkan sangatlah rawan dengan penipuan. Selain itu uang yang diterima biasanya habis dikonsumsi dan tidak dimanfaatkan secara berencana dan maksimal. Padahal perencanaan keuangan yang baik sangat diperlukan untuk kesejahteraan baik PMI maupun keluarganya, sehingga taraf kehidupan mereka di masa depan juga membaik (Mandiri Institute, 2018).

Atas dasar permasalahan di sisi *funding* terkait dengan pengkolektifan remitansi PMI maupun di sisi *financing* terkait peningkatan profesionalisme PMI sebagai modal yang signifikan untuk meningkatkan devisa negara yang pada akhirnya dapat menanggulangi masalah defisit neraca transaksi berjalan maka penulis menawarkan sebuah konsep strategi. Konsep ini dinamakan dengan Sinergi dan Koordinasi Funding Financing (SKFF) yang akan melibatkan berbagai sektor yang berkepentingan untuk memecahkan masalah yang ada. Berikut bagan atau gambaran dari strategi SKFF.

3.1. Strategi *Funding* Profesionalisme Pekerja Migran Indonesia

Funding atau pengumpulan devisa sebagai pemasukan kas negara yang berasal dari sektor tenaga kerja khususnya PMI dilakukan oleh sektor perbankan Indonesia dan diawasi oleh kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari sisi *funding* penulis menawarkan sinergi dan koordinasi kedua sektor yakni keuangan dan perbankan. Adapun strategi yang bisa dilakukan oleh sektor keuangan melalui kebijakan yang dikeluarkan. Sementara strategi di sektor perbankan adalah memberikan fasilitas yang dibutuhkan PMI demi kemudahan dan kelancaran pengiriman uang.

Di sektor keuangan, kebijakan pertama terkait dengan kebijakan remitansi penerimaan yang dihasilkan oleh PMI yakni kebijakan pengurangan biaya jasa remitansi dengan subsidi pemerintah. Keluhan yang dirasakan oleh PMI terkait pengiriman uang ke Indonesia maupun dari Indonesia ke negara lain adalah besarnya biaya jasa remitansi. Biaya yang timbul dari jasa pengiriman remitansi terbagi dalam dua jenis, yaitu: 1. Biaya transaksi: Biaya yang timbul atas pelayanan jasa pengiriman uang yang berbeda pada masing-masing penyedia layanan jasa. 2. Biaya komisi: Biaya yang timbul atas aktivitas jual-beli valuta asing yang digunakan dalam transaksi. Pemerintah dapat mengurangi biaya jasa remitansi ini dengan menurunkan biaya-biaya ini atau memberikan subsidi (OJK, 2018).

Kebijakan kedua yakni terkait dengan efektifitas Lembaga Keuangan Digital (LKD) atau yang umum dikenal dengan *financial technology (fintech)* sebagai layanan penyedia jasa pengiriman uang dalam hal ini badan usaha yang menyediakan jasa pengiriman uang dan memiliki lisensi dari otoritas setempat. LKD mengintegrasikan pelayanan bank dan teknologi informasi dan komunikasi (telepon seluler dan/atau web). *Fintech* mampu melayani electronic money, virtual account, agregator, lending, crowdfunding dan transaksi keuangan online lainnya (Rizal, Maulina, & Nenden, 2018). Layanan ini awalnya diterapkan dengan didasari statistik bahwa jumlah penduduk yang memiliki akses telekomunikasi melalui telepon seluler lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang memiliki akses perbankan. Layanan ini sukses diterapkan di banyak negara berkembang seperti Bangladesh, Botswana, Brazil, Burkina Faso, Kenya, Mali, Pakistan, Peru, Somalia, dan Zimbabwe. Beberapa operator telekomunikasi di Indonesia saat ini sudah menjembatani layanan remitansi bekerjasama dengan operator remitansi global. Biaya remitansi yang dibebankan relatif lebih rendah dari layanan remitansi perbankan (Arif Perdana, n.d.).

Sementara di sektor perbankan, setelah melakukan identifikasi awal penempatan PMI dari berbagai hal, penulis menawarkan dua strategi yang dapat dilakukan oleh sektor perbankan. Strategi pertama yakni membuka kantor cabang bank di negara-negara penempatan PMI juga di kota atau desa asal PMI. Mengacu pada identifikasi penempatan PMI berdasarkan negara tujuan, negara-negara di Asia Pasifik seperti Taiwan, Malaysia dan Hongkong merupakan tiga terbesar penempatan PMI saat ini. Oleh karena itu kantor cabang bank perlu dibuka di banyak wilayah negara-negara tersebut demi mendongkrak penerimaan remitansi PMI dengan tidak mengabaikan negara lainnya yang banyak juga penempatannya.

Sebagai informasi, porsi pengiriman uang PMI yang bekerja di Asia Pasifik mencapai hampir 70 persen dari total remitansi pada tahun 2018. Total pengiriman remitansi dari Asia Pasifik mencapai US\$ 6,6 miliar,

diikuti kawasan Timur Tengah dan Afrika yang mencapai US\$ 4,4 miliar lalu Amerika 20,1 juta US\$ dan terakhir Eropa 30,4 juta US\$. Remitansi dari Asia Pasifik masih didominasi oleh Malaysia di susul Hong Kong dan Taiwan. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Remitansi Pekerja Migran Indonesia
Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2016-2018 (Dalam US\$)

Negara	2016	2017	2018
Asia Pasifik	4.682.203.043	3.924.576.508	6.557.840.950
Timteng & Afrika	3.422.238.938	5.124.262.838	4.362.474.502
Amerika	651.811.878	163.151.342	20.094.815
Eropa	100.555.646	69.642.081	30.397.660
Total	8.856.809.505	8.761.207.216	10.970.807.926

Sumber : Data BNP2TKI, Juni 2019

Selain mempertimbangkan negara penyumbang remitansi terbesar bagi Indonesia sehingga bank dapat fokus untuk membuka cabang/kantor luar negeri di negara tersebut, yang tidak kalah penting adalah memperkuat kondisi kantor cabang dan kanwil tempat kantung asal pekerja migran berasal. Namun tetap tidak mengabaikan provinsi lainnya yang juga banyak mengirimkan PMI. Data pada tabel 2 menunjukkan tiga provinsi yang paling banyak penempatan PMI dalam tiga tahun terakhir adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Tabel 2. Penempatan PMI berdasarkan Provinsi

PROVINSI	2018 Mei	2019 Mei	2020 Mei
Jawa Timur	6.169	6.819	1.489
Jawa Tengah	5.618	6.392	848
Jawa Barat	5.405	6.366	564

Sumber : Data BP2MI, Mei 2020

Strategi kedua yang ditawarkan di sektor perbankan adalah inovasi produk investasi dan transfer di perbankan untuk PMI. Setelah melakukan identifikasi atas struktur penempatan PMI berdasarkan sektor formal dan informal serta jabatan dan kelompok lingkungan usaha Indonesia, ada beberapa produk yang potensial untuk ditawarkan. Produk-produk tersebut adalah yang mempunyai tujuan transaksi kebutuhan sehari-hari (transfer dalam bentuk tabungan untuk kebutuhan hidup, tabungan pendidikan anak, investasi jangka pendek untuk tujuan tertentu (dana mudik, naik haji), maupun investasi jangka panjang (cicil emas, tabungan reksadana, membuat usaha setelah kembali ke tanah air, kredit rumah/kendaraan bermotor di tanah air).

Produk yang ditawarkan juga perlu disosialisasikan dengan baik kepada PMI. Beberapa program seperti tabungan haji atau umroh bisa ditawarkan kepada yang beragama Islam. Adanya program istimewa seperti biaya transfer yang rendah saat bulan Ramadhan, akhir tahun ataupun hari raya Imlek, sesuai dengan negara dan trend penerimaan bonus di sana. Produk yang terkait investasi seperti cicil emas dan reksadana, perlu diberikan sosialisasi mengenai jenis investasi dan resikonya. Untuk para PMI yang hendak kembali ke Indonesia, perlu juga dilakukan pembekalan keterampilan yang diperlukan sesuai mereka kembali ke tanah air (bisnis membuka salon/kuliner/penyewaan kendaraan) maupun cash management dan cara dasar mengelola bisnis

tersebut (pembukuan dasar dan perpajakan untuk UKM). Dengan demikian, PMI akan merasakan langsung manfaatnya dan hasil kerja keras mereka dapat dimonitor baik penggunaannya maupun penyalurannya (Mandiri Institute, 2018).

Remitansi sangat bermanfaat bagi PMI, dan pemanfaatannya dapat digolongkan menjadi dua yaitu untuk investasi konsumsi dan investasi produktif. Kegiatan investasi konsumsi akan memberikan dampak secara mikro, sedangkan investasi produktif akan berdampak secara makro (Dewandaru, Rahmadi, & Husniati, 2019). Remitan secara berkala menunjukkan peningkatan yang stabil temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa remitan memiliki dampak positif terhadap peningkatan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi (Zheng & Musteen, 2018).

3.2 Strategi *Financing* Profesionalisme Pekerja Migran Indonesia

Financing atau pembiayaan perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan program-program yang diajukan sehingga target yang diharapkan dapat tercapai. Terkait penciptaan Pekerja Migran Indonesia yang berkualitas baik yang profesional di sektor formal maupun terampil di sektor informal perlu dianalisa dari sektor hilir hingga ke hulunya. Di sektor hilir adalah sumber awal penciptaan PMI tersebut. Untuk mendapatkan PMI yang berkualitas dapat diperoleh melalui sektor Pendidikan dan Pelatihan. Sektor hulu adalah penempatan para PMI tersebut, dan yang berperan adalah sektor Tenaga Kerja. Sementara keberlangsungan proses PMI ini akan dikawal oleh sektor Luar Negeri serta Hukum dan HAM. Seluruh program-program yang dijalankan oleh sektor-sektor tersebut akan dibantu sosialisasinya oleh sektor komunikasi dan Informasi.

Strategi yang ditawarkan untuk pembiayaan di sektor Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Penggiatan Wajib belajar 12 tahun, prioritas masuk & lulus SMK siap kerja
2. Intensitas pelatihan formal & informal
3. Penelitian dan penguatan teknologi untuk evaluasi program

Strategi pertama yang ditawarkan adalah berdasarkan fakta tingginya angka pengangguran dari lulusan SMK, sementara di sisi lain kebutuhan akan tenaga kerja Indonesia di negara lain sangat tinggi. Program SMK adalah menyiapkan lulusan yang terampil dan siap kerja. Pembiayaan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan mutu lulusan SMK dengan memperbaiki input pendukungnya seperti kurikulum, guru atau pendidik profesional dan fasilitas belajar mengajar. Pelatihan terbukti mempunyai kontribusi signifikan bagi profesionalisme guru (Widya & Pd, 2017). Orientasi input pendukung atas tantangan permintaan bekerja di luar negeri perlu dipertajam, sehingga lulusan yang dihasilkan dari SMK (*output*) dapat menjadi solusi atas masalah yang ada. Untuk strategi ini perlu sinergi dan koordinasi antara Kementerian Pendidikan bersama Kementerian Tenaga Kerja dengan kementerian Keuangan.

Strategi kedua adalah intensitas pelatihan formal dan informal, khususnya bagi mereka yang lulusan non SMK baik jenjang yang setara (SMA), di atasnya (diploma dan sarjana) maupun dibawahnya (SMP & SD). Strategi ini sangat penting demi menyiapkan PMI yang handal dan berketrampilan sebagaimana permintaan *user* di negara tujuan. Sinergi dan koordinasi antara Kementerian Pendidikan (formal dan nonformal)

bersama Kementerian Tenaga Kerja dengan kementerian Keuangan Koordinasi antara kementerian Pendidikan juga diperlukan untuk strategi ini.

Strategi ketiga adalah penelitian dan penguatan teknologi untuk evaluasi program. Penelitian yang dimaksud adalah segala hal yang berhubungan dengan peningkatan *funding* dan *financing* terkait PMI. Strategi ini akan dilakukan oleh kementerian riset dan teknologi Pendidikan tinggi (Ristekdikti) dan bersinergi dengan departemen keuangan untuk pembiayaannya.

Di sektor ketenagakerjaan, strategi yang ditawarkan mengacu pada ulasan tentang program-program BP2MI untuk PMI terampil dan profesional. Mereka yang memiliki kualifikasi ini akan mendapatkan “gaji” yang lebih tinggi daripada yang tidak atau kurang berkualifikasi. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan pembiayaan di program-program ini seperti program G to G atau G to P yakni program penempatan milik Pemerintah Indonesia dengan negara lain (Pemerintah/Swasta) yang sudah memiliki MoU seperti Korea Selatan, Jepang dan Taiwan. Program G to G Korea Selatan membuka kesempatan bagi Calon PMI yang ingin bekerja ke Korea Selatan pada sektor *Manufacturing*, Perikanan, Pertanian dan Bangunan. Jumlah penempatan PMI yang lulus program G to G ke Korea selatan terus mengalami peningkatan (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Penempatan PMI Program G to G Korea Selatan

BULAN	2017	2018	2019
April	803	519	935
Mei	261	516	256
Juni	224	211	817
Total	1.288	1.246	2.008

Sumber : Data BNP2TKI Juni 2019

Sementara Program G to G ke Jepang tersedia untuk jabatan *nurse* dan *careworker* di Rumah Sakit pemerintah Jepang. Untuk bisa mengikuti program ini calon PMI harus memiliki ijazah Pendidikan serendah-rendahnya D3 Keperawatan. Jumlah penempatan PMI yang lulus program G to G ke Jepang untuk juga mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Penempatan PMI Program G to G Jepang Tahun 2017-2019

TAHUN	NURSE		CAREWORKER		TOTAL
	L	P	L	P	
2017	7	22	94	201	324
2018	11	20	110	188	329
2019	15	23	99	201	338
L/P	33	65	303	590	991
TOTAL	98		893		991

Sumber : Data BP2MI, Mei 2020

Perawat Indonesia yang lulus ujian nasional perawat dan bersertifikat di Jepang mendapatkan gaji sekitar Rp21-30 juta per bulan. Sedangkan yang belum lulus diupah di bawah Rp20 juta, di bawah upah minimum di Tokyo. Pemerintah Jepang mensyaratkan *nurse* dan *careworker* yang berasal dari luar harus menempuh ujian nasional perawat agar dapat bekerja profesional di rumah sakit dan panti orang lanjut usia. Terjadi

peningkatan *nurse* dan *care worker* yang lulus ujian nasional tiga tahun terakhir.

Tabel 5. Jumlah Nurse dan Careworker Lulus Ujian Nasional
Tahun 2017-2019

Tahun	Nurse	Careworker	Total
2017	21	68	89
2018	29	62	91
2019	15	78	93
Total	65	208	279

Sumber : Data BP2MI, Mei 2020

Program G to P ke Taiwan tersedia untuk perawat ke Rumah Sakit Geriatri di Taiwan. Syarat mengikuti program ini harus lulusan D3/D4/S1 Keperawatan + Ners dan harus mempunyai STR yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau yang sudah mempunyai nomor surat keterangan lulus ujian kompetensi. Sementara data penempatan PMI G to P to Taiwan belum tersedia.

Selain penguatan pada pembiayaan untuk program-program BP2MI yang telah ada perlu juga pembiayaan yang dikhususkan untuk strategi Diversifikasi MoU Penempatan PMI dan Ekstensi negara- negara baru penempatan PMI professional. Artinya sektor ketenagakerjaan perlu memperluas ragam kesepakatan penempatan PMI professional di banyak lingkup kerja dan industri. Saat ini yang baru berjalan adalah lingkup *Manufacturing*, Perikanan, Pertanian dan Bangunan di Korea Selatan dan Kesehatan di Taiwan dan Jepang. Padahal masih banyak negara-negara lain yang membutuhkan PMI professional seperti negara-negara di Eropa dan banyak di negara lainnya di Timur Tengah, Afrika dan Australia.

Di sektor hubungan luar negeri serta hukum dan HAM, strategi pertama adalah Peningkatan Kerjasama & Diplomasi. Strategi kedua adalah Integrasi akses & administrasi data. Pembiayaan di kedua strategi tersebut perlu dilakukan mengingat Indonesia sebagai salah satu negara yang terikat dengan aturan dan kesepakatan Lembaga-lembaga resmi di dunia yang ada baik regional seperti ASEAN, maupun internasional seperti PBB. Dengan pembiayaan di kedua strategi sektor ini akan semakin memudahkan proses penempatan dan perlindungan PMI serta dapat mengatasi permasalahan PMI sangat kompleks, baik yang menyangkut permasalahan administratif, teknis, hukum, sosial, ekonomi, keluarga yang ditinggal dan jaminan masa depan. Permasalahan tersebut ada yang berada dalam wilayah tanggungjawab Pemerintah Pusat, Lembaga Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri (Kedutaan Besar RI), Pemerintah Daerah baik Propinsi dan Kabupaten/Kota sampai pemerintah Desa, bahkan pihak swasta (Widiyahseno, Rudianto, & Widaningrum, 2017).

Terakhir, di sektor komunikasi & informasi, ada dua strategi yang ditawarkan untuk pembiayaannya. Strategi pertama yaitu sosialisasi program-program seluruh sektor dan strategi kedua Inovasi aplikasi *online*. Kedua strategi ini untuk mendukung pemasaran dan peningkatan literasi masyarakat khususnya PMI. Kementerian komunikasi dan informasi akan bersinergi dengan seluruh sektor yang ada seperti Keuangan, Perbankan, Pendidikan, Tenaga Kerja, Luar Negeri serta Hukum dan HAM.

4. PENUTUP

Meskipun telah ada upaya dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan jumlah PMI di sektor formal, faktanya jumlahnya di sektor informal masih mendominasi. Oleh karena itu diperlukan terobosan yang serius di sektor pendidikan khususnya SMK untuk menciptakan lulusan siap kerja yang profesional di bidangnya agar dapat dikirim ke luar negeri. Profesionalisme PMI menjadi kata kunci untuk mendongkrak nilai remitansi yang berkontribusi bagi devisa negara. Konsep Strategi Sinergi dan Koordinasi *Funding Financing* (SKFF) antar berbagai sektor yang berkepentingan terkait peningkatan profesionalisme PMI yang ditawarkan oleh penulis dapat menjadi rujukan bagi *stakeholder* sebagai suatu solusi atas masalah defisit neraca transaksi berjalan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Website :

- Arif Perdana. (n.d.). Remitansi dan Layanan Keuangan Digital. Retrieved from <https://tirto.id/remitansi-dan-layanan-keuangan-digital-coov>
- Jayani, D. H. (2020). Lulusan SMK Mendominasi Tingkat Pengangguran Terbuka. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/07>
- OJK 2018. (n.d.). Layanan Jasa Pengiriman Uang (Remitansi). Retrieved from <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/434>
- Pranowo, Y. (2019). *Kondisi Neraca Pembayaran Indonesia Serta Masalah Defisit Neraca Transaksi Berjalan*. Bandung. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/338101559>

Jurnal :

- Astuti, I. P., Oktavilia, S., & Rahman, A. R. (2015). The International Balance of Payments Role in the Economy of Indonesia, 8(2), 173–182.
- Dewandaru, B., Rahmadi, A. N., & Husniati, E. (2019). Pemanfaatan Remitansi Pekerja Migran Indonesia Serta Peran Usaha Pekerja Migran Indonesia Purna Untuk. *Warmadewa Economic Development Journal*, 2(2).
- Fahmi, A. (2020). Analisis kausalitas antara neraca transaksi berjalan, pertumbuhan PDB, nilai tukar, dan investasi modal asing langsung, 22(1), 1–10.
- Fitri, W. (2014). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NERACA TRANSAKSI BERJALAN : STUDI KASUS INDONESIA TAHUN 1990-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 3(1).
- Keuangan, K. (2018). Langkah Negara Kendalikan Neraca. *Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*, XIII(134).
- Lapian, M., Rotinsulu, T. O., & Wauran, P. C. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NERACA TRANSAKSI BERJALAN DI INDONESIA PERIODE 2010 : Q1-2017 : Q4 INDONESIA PERIOD 2010 : Q1-2017 : Q4. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(02), 193–203.
- Leonufna, L., Kumaat, R., Mandei, D., & Ratulangi, U. S. (2016). ANALISIS PENGARUH PEMBAYARAN NERACA INTERNASIONAL TERHADAP TINGKAT KURS RUPIAH / DOLLAR AS MELALUI CADANGAN DEvisa DALAM SISTEM KURS MENGAMBANG BEBAS DI INDONESIA, 16(02), 315–324.
- Prihanto, P. H. (2013). Pengaruh Status Pekerja dan Negara Penempatan Terhadap Remitansi Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(7), 33–41.
- Raharto, A. (2017). PENGAMBILAN KEPUTUSAN TENAGA KERJA

- INDONESIA (TKI) PEREMPUAN UNTUK BEKERJA DI LUAR NEGERI : KASUS KABUPATEN CILACAP (DECISION MAKING TO WORK OVERSEAS AMONG INDONESIAN WOMEN, 12(1), 39–54.
- Rizal, M., Maulina, E., & Nenden, K. (2018). FINTECH SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI PEMBIAYAAN BAGI UMKM ABSTRAK. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 89–100.
- Sahari. (2015). Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Mengajar terhadap Profesionalisme Guru Di SMAN I Likupang. *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM IQRA*, 9, 62–86.
- Sandu, C. (2015). sandu. *Procedia Economics and Finance*, 32, 763 – 768. Retrieved from <https://pdf.sciencedirectassets.com/282136/1->
- Widiyahseno, B., Rudianto, & Widaningrum, I. (2017). Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017. *Sosio Informa*, 4(3), 501–513.
- Widya, M. A., & Pd, M. (2017). Pengaruh Pelatihan Terhadap Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Di Tulungagung. *JUPEKO (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 2(2), 64–74.
- Zheng, C., & Musteen, M. (2018). The Impact of Remittances On Opportunity Based and Necessity-based Entrepreneurial Activities. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 24(3). Retrieved from <https://www.abacademies.org/articles/the-impact-of-remittances-on-opportunity-based-and-necessitybased-entrepreneurial-activities-7548.html>

Buku :

- Tambunan, T. (2011). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bank Indonesia. (2014). *Laporan NPI TW IV Final (2010-2014)*.
- Bank Indonesia. (2015). *Laporan NPI TW IV 2015*.
- Bank Indonesia. (2016). *Laporan NPI TW IV 2016*.
- Bank Indonesia. (2017). *Laporan NPI TW IV 2017*.
- Bank Indonesia. (2018). *Laporan NPI TW IV 2018*.
- Bank Indonesia. (2019). *Laporan NPI TW IV 2019*.
- BNP2TKI. (2019). *Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode Juni 2019*.
- BP2MI. (2020). *Data Penempatan & Pelindungan PMI Periode Mei 2020*.
- RI, Menteri Ketenagakerjaan. Kepmen Ketenagakerjaan RI No 260 Tahun 2015.